



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.13, No.1, Juni 2016

KOMUNITAS ASEAN DAN TANTANGAN KE DEPAN

- Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian *Cybersecurity* melalui *ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives*
- Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia
- Transformasi Ruang dan Partisipasi *Stakeholders*: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003
- Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat

RESUME PENELITIAN

- Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru
- Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara
- Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN

REVIEW BUKU

- Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 1	Hlm. 1-143	Jakarta, Juni 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Mitra Bestari

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Prof. Dr. Dede Mariana (*Ahli Kajian Politik Lokal dan Pemerintahan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)
Dr. Nurliah Nurdin (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemimpin Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Kurniawati Hastuti Dewi, Ph.D (*Ahli Kajian Politik Lokal, Gender dan Politik*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)

Redaksi Pelaksana

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

Sekretaris Redaksi

Hayati Nufus, S.Hum
Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id

ISSN

1829-8001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii-v
Artikel	
• Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity melalui ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives <i>David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari</i>	1-20
• Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia <i>Fathimah Fildzah Izzati</i>	21-32
• Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003 <i>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar</i>	33-52
• Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat <i>Sandy Nur Ikfal Raharjo</i>	53-68
Resume Penelitian	
• Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru <i>Diandra Megaputri Mengko, dkk</i>	69-82
• Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara <i>Awani Irewati, dkk</i>	83-104
• Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN <i>Khanisa, dkk</i>	105-118
Review Buku	
• Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan <i>Nanto Sriyanto</i>	119-136
Tentang Penulis	137-138
Pedoman Penulisan	141-145

CATATAN REDAKSI

Tahun 2016 menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia dan ASEAN, karenan di permulaan tahun ini Komunitas ASEAN resmi dijalankan. Pembentukan komunitas ini disepakati oleh sepuluh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan cita-cita integrasi di antara mereka. Integrasi di kawasan ini juga diharapkan dapat membuka pintu yang lebih lebar bagi peluang kerja sama di tingkat ASEAN, sehingga dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan ini. Selain peningkatan kesejahteraan di kawasan, hal lain yang juga ingin dicapai oleh ASEAN adalah membangun komunitas yang menguatkan solidaritas di antara anggotanya dan lebih bersifat people-oriented. Di tengah dinamika politik dan ekonomi di tingkat internasional yang semakin kompleks, Komunitas ASEAN diharapkan mampu mendorong sepuluh anggotanya untuk meningkatkan daya saing mereka miliki, sehingga ASEAN siap menghadapi tantangan regional dan internasional yang ada. Dalam membangun komunitas yang dicita-citakan, dibentuklah tiga pilar utama, yaitu: Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN diharapkan mampu menjaga ASEAN untuk tetap berkomitmen dalam memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan. Hal ini diperlukan agar ASEAN dapat membangun lingkungan politik yang harmonis yang mampu menghadapi ancaman-ancaman dari luar ataupun potensi konflik di dalam tubuh ASEAN sendiri. Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ASEAN membangun Komunitas Ekonomi ASEAN dengan tujuan untuk mendorong pergerakan roda ekonomi dan perdagangan antarnegara anggota ASEAN yang mampu bersaing secara sehat. Peningkatan daya saing produk-produk dari masing-masing negara anggota ASEAN diperlukan agar ASEAN dapat mengambil peluang yang besar

dari perdagangan bebas di dunia internasional. Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan dapat memperkecil gap perkembangan ekonomi di antara negara anggota ASEAN dan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota ASEAN. Selain peningkatan kesejahteraan ekonomi, ASEAN juga mengharapkan terbentuknya masyarakat yang memiliki solidaritas dan rasa kebersamaan yang kuat terhadap ASEAN. Untuk itulah dibentuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Kedekatan geografis diharapkan tidak hanya mampu menjalin keterhubungan secara fisik di ASEAN, namun juga mampu menjalin keterhubungan di antara masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Implementasi tiga pilar Komunitas ASEAN pada dasarnya akan membawa peluang yang sangat besar bagi ASEAN. Akan tetapi, pemberlakuan Komunitas ASEAN juga harus menghadapi beberapa tantangan yang muncul baik dari dalam tubuh ASEAN ataupun dari luar. Perbedaan tingkat kemajuan di antara negara anggota merupakan tantangan internal yang harus dihadapi ASEAN. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dapat menjadi ganjalan integrasi yang ingin dicapai oleh ASEAN, terutama dalam sektor ekonomi. Selain itu, perbedaan kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi Komunitas ASEAN juga menjadi tantangan bagi ASEAN. Sementara tantangan dari luar misalnya adalah tantangan yang muncul dari konstelasi politik internasional yang masih didominasi oleh kekuatan-keuatan negara besar, seperti Amerika dan Tiongkok. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam) dan Tiongkok apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat menjadi ganjalan bagi kestabilan di kawasan ini.

Bagi Indonesia, Komunitas ASEAN juga membuka peluang yang besar, terutama dalam mendorong peningkatan daya saing yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, dilihat dari kesiapannya, peluang yang ada tidak dapat diambil secara optimal oleh Indonesia apabila pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, pembangunan infrastruktur, kerangka hukum, serta kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi Indonesia dalam Komunitas ASEAN dirasa masih kurang. Dari segi sosial masyarakat, Indonesia masih harus menghadapi kenyataan bahwa kesadaran masyarakat akan Komunitas ASEAN masih rendah. Belum banyak masyarakat yang menyadari arti penting Komunitas ASEAN atau ASEAN sendiri bagi Indonesia. Melihat kenyataan ini, *Jurnal Penelitian Politik* kali ini mengangkat tema “Komunitas ASEAN dan Tantangan ke Depan” untuk melihat lebih lanjut sejauh mana implementasi Komunitas ASEAN akan membawa dampak bagi ASEAN ataupun Indonesia, dan tantangan apa saja yang akan dihadapi di masa mendatang. *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini menyajikan lima artikel, dan tiga resume hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI.

Artikel pertama berjudul **“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cyber Security Melalui ASEAN Regional Forum on Cyber Security Initiatives”** yang ditulis oleh David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari mencoba membahas tentang upaya Indonesia dalam memanfaatkan ASEAN Regional Forum (ARF) on cyber security initiatives untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Kemajuan teknologi, terutama di bidang cyber telah membuat batas antarnegara menjadi semakin kabur. Hal ini memicu munculnya kejahatan dan ancaman nirmiliter di bidang teknologi bagi sebuah negara dalam bentuk ancaman cyber. Untuk menghadapi hal tersebut Indonesia memerlukan strategi untuk melindungi keamanannya. ARF menjadi salah satu forum yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengajak negara-negara ASEAN dan negara mitranya untuk bekerja sama dalam

meningkatkan pertahanan dan menjaga stabilitas di kawasan.

Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kita berbicara tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Fathimah Fildzah Izzati yang berjudul **“Membaca ‘PHK Massal’: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan bagi Gerakan Buruh di Indonesia”** mencoba melihat dampak pemberlakuan MEA bagi buruh-buruh yang ada di Indonesia. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong MEA sempat menimbulkan isu “PHK Massal”. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi MEA, terutama dalam bidang industri elektronik.

Artikel berjudul **“Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN pasca-2003”** ditulis oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. Artikel ini menjelaskan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam dua sektor regionalisasi ASEAN, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar untuk mengakomodasi partisipasi ‘pemangku kepentingan’/stakeholders yang ada di dalamnya.

Dengan adanya integrasi di kawasan ASEAN melalui implementasi Komunitas ASEAN, masyarakat yang paling merasakan dampak langsung keterhubungan dan menipisnya batas antarnegara melalui integrasi tersebut adalah masyarakat di perbatasan. Artikel berjudul **“Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat”** mencoba mengulas tentang sejauh mana kesiapan yang dimiliki oleh warga di wilayah perbatasan Indonesia dalam menyongsong

pemberlakuan Komunitas Ekonomi ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo ini melihat ketahanan yang dimiliki masyarakat di Entikong melalui enam modal: modal alam, modal sosial, modal keuangan, modal politik/pemerintahan, modal fisik, dan modal manusia. Dari hasil analisis ini direkomendasikan bahwa pemerintah perlu melakukan reoptimalisasi kerja sama lintas perbatasan dengan negara lain untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di perbatasan, dan perlu membuat aturankhusus untuk perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Selain lima artikel di atas, *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini juga menampilkan tiga resume penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian di Pusat Penelitian Politik. Resume penelitian pertama adalah mengenai perkembangan intelegen di Indonesia. Dalam ringkasan penelitian yang berjudul **“Intelejen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”** yang disusun oleh Ikrar Nusa Bhakti dan Diandra Mengko Megaputri dibahas mengenai perkembangan dinamika intelegen Indonesia terutama pada masa setelah orde baru. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang teori intelegen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia.

Tim Penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI pada tahun 2015 juga melakukan penelitian yang terkait dengan Komunitas ASEAN. Salah satunya adalah resume penelitian berjudul **“Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara”** yang disusun oleh Awani Irewati, dkk. Pada penelitian ini Tim Perbatasan Pusat Penelitian Politik LIPI melakukan penelitian tentang upaya pembangunan keterhubungan melalui kerja sama lintas perbatasan di sub-kawasan Sungai Mekong antara Tiongkok dengan lima negara ASEAN: Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dalam kerja sama sub-kawasan ini, Tiongkok sebagai negara non-ASEAN menjadi salah satu penggerak aktif kerja sama *Greater Mekong Subregion*. Keterhubungan yang dilihat bukan hanya keterhubungan fisik saja, melainkan juga keterhubungan institusi dan keterhubungan masyarakat. Kerja sama sub-kawasan di ASEAN

sangat penting, terutama untuk mempersempit adanya gap perkembangan antara ASEAN bagian utara dengan negara anggota ASEAN yang lainnya. Dalam artikel ini juga dibahas mengenai peran kerja sama sub-kawasan di ASEAN dalam membangun keterhubungan yang akan mendorong kesuksesan implementasi Komunitas ASEAN.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa salah satu tantangan bagi Indonesia dalam melaksanakan Komunitas ASEAN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap Komunitas ASEAN. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Politik pada tahun 2015. Dalam ringkasan penelitian terakhir berjudul **“Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN”** yang disusun oleh Khanisa, dkk dijelaskan bahwa kesadaran dan pemahamann publik menjadi faktor kunci yang menentukan apakah pilar-pilar yang telah disusun untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dapat direalisasikan dengan baik. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditunjukkan untuk Kementerian terkait. Strategi yang disarankan salah satunya adalah menekankan sebuah upaya berkelanjutan dan memiliki sasaran yang lebih nyata dalam melaksanakan program-program sosialisasi mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN kepada masyarakat.

Catatan redaksi kali ini kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi sehingga *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini dapat terbit. Terima kasih kami ucapkan untuk penulis, mitra bestari, serta tim pengelola jurnal. Semoga *Jurnal Penelitian Politik* ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan dan praktis terkait dengan kajian mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN, serta dampaknya bagi Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 324.2598

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya
Wahyudi Sumari**

**DIPLOMASI PERTAHANAN
INDONESIA DALAM PENCAPAIAN
CYBERSECURITY MELALUI
ASEAN REGIONAL FORUM ON
CYBERSECURITY INITIATIVES**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 1-20

Perkembangan teknologi informasi di dunia internasional berdampak pada penggunaan ruang cyber yang mencakup semua aspek kehidupan nasional. Dihadapkan pada kondisi ini, pemerintah harus memahami kondisi cybersecurity di Indonesia dan membangunnya agar mampu mengatasi berbagai ancaman yang datang melalui ruang cyber. Selain kondisi internal, ruang lingkup eksternal perlu diperhatikan mengingat ancaman cyber yang bersifat transnasional, melewati batas kedaulatan, dan telah dipandang sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia. ASEAN telah menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, strategi diplomasi pertahanan diarahkan untuk meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antar negara dan mengurangi potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari lingkup eksternal. Upaya tersebut, menghasilkan kesepakatan berupa point of contacts antar negara dan persamaan pandangan untuk terus mengadakan pelatihan cybersecurity dalam bentuk seminar maupun workshop untuk membangun kapasitas sumber daya manusia. Strategi dan upaya tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan data-data primer dikumpulkan melalui

wawancara dengan 15 informan dari berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, literatur, jurnal, dan dokumen terkait juga digunakan sebagai data pendukung.

Kata Kunci: ARF, confidence building measures, cybersecurity, diplomasi pertahanan

DDC: 324.2598

Fathimah Fildzah Izzati

**MEMBACA “PHK MASSAL”:
RANTAI NILAI INDUSTRI
ELEKTRONIK, MEA, DAN TANTANGAN
BAGI GERAKAN BURUH DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 21-32

“PHK Massal” sempat menjadi isu dalam politik perburuhan awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut keterlibatan Indonesia dalam MEA. Adanya konstruksi kata “massal” dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun lebih terkait erat dengan politik produksi dalam industri elektronik. Pada sisi lain, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas, termasuk dalam konteks MEA. Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki

peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memosisikan dirinya di dalam rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.

Kata Kunci: PHK Massal, Rantai Nilai Industri Elektronik, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, MEA, Gerakan Buruh

DDC: 320.014

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

TRANSFORMASI RUANG DAN PARTISIPASI *STAKEHOLDERS*: MEMAHAMI KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH INDONESIA DALAM PROSES REGIONALISME ASEAN PASCA-2003

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 33-52

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Sebelum 2003, ASEAN hanya diposisikan sebagai ‘organisasi internasional’ yang berpusat pada negara anggota sebagai satu-satunya aktor di kawasan. Menyusul diberlakukannya Masyarakat ASEAN pada tahun 2003, artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar bagi kontestasi antara negara dan ‘pemangku kepentingan’/ stakeholders yang ada di dalamnya, terutama kelompok bisnis (konglomerat dan UKM) serta organisasi masyarakat sipil. Dengan menggunakan perspektif kritis, artikel ini mencoba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pola interaksi yang terbangun antara aktor-aktor ‘non-negara’ dan ‘negara’ dalam spektrum Masyarakat ASEAN dimungkinkan oleh interaksi yang kian besar antara aktor-aktor yang ada di dalamnya, sehingga membuka kontestasi antar-stakeholders dalam organisasi regional yang telah bertransformasi. Hal ini kemudian memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang regionalisme di Asia Tenggara. Argumen tersebut akan dijelaskan melalui dua studi

kasus, yaitu aktivitas Organisasi Masyarakat Sipil HAM dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.

Kata Kunci: Regionalisme, Partisipasi, Pemangku Kepentingan, Masyarakat ASEAN, Asia Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Usaha Kecil & Menengah

DDC: 320.014

Sandy Nur Ikfal Raharjo

KETAHANAN SOSIAL WARGA PERBATASAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 53-68

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi MEA yang inklusif pada tahun 2025. Sebagai penduduk kawasan perbatasan yang pintu gerbang lintas batas Indonesia-Malaysia, masyarakat Entikong harus memiliki ketahanan sosial yang kuat untuk menghadapi semakin bebasnya pergerakan orang dan barang di wilayah mereka. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi MEA tersebut. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, ketahanan sosial masyarakat Entikong juga dibantu dengan pelaksanaan kerja sama lintas Indonesia-Malaysia. Tulisan ini menyarankan reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Kata Kunci: Entikong, ketahanan sosial, kerja sama lintas batas, Masyarakat Ekonomi ASEAN

DDC: 320.014

Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko

**INTELIJEN DALAM PUSARAN
DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA
ORDE BARU**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 69-82

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Kata Kunci : Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru

DDC: 352.14

Awani Irewati

**PROBLEMATIKA KERJA SAMA
PERBATASAN SEPANJANG SUNGAI
MEKONG ANTARA TIONGKOK DAN
ASEAN BAGIAN UTARA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 83-104

Selama berabad-abad, sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan orang enam negara riparian ini. Secara geografis, mengalir melalui negara-negara tersebut untuk sekitar 4.900 km. Ini menciptakan sebuah DAS 795.000 km², didistribusikan antara Upper Mekong River Basin yang terbentuk oleh China (21 persen) dan Myanmar (3 persen), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25 persen), Thailand (23 persen), Kamboja (20 persen), dan Viet Nam (8 persen) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang mereka sendiri di atas Sungai Mekong dan sub regional yang, negara-negara riparian telah mengembangkan beberapa inisiatif kerjasama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Komisi [MRC] dll adalah contoh dari kerjasama lintas batas. Selain itu, ada beberapa kerjasama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari sub regional Mekong tetapi tidak secara khusus fokus pada Mekong River, yaitu ASEAN-China Free Trade Area dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerjasama di sub regional Mekong. Analisis tulisan ini beberapa potensi/masalah yang ada yaitu kemungkinan bahwa mereka kerjasama tumpang tindih; perbedaan profil negara-negara ‘tampaknya membuat kepentingan yang berbeda di antara mereka dll Analisis tersebut didasarkan pada beberapa penelitian lapangan di beberapa tempat (Vietnam, Laos, Thailand) pada tahun 2015.

Kata kunci: kerjasama lintas batas, negara-negara ASEAN Utara, RUPS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas.

DDC: 352.14

Khanisa

**STRATEGI PENINGKATAN
PEMAHAMAN MASYARAKAT
TENTANG MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 105-118

ASEAN tengah merubah pendekatan institusinya dari top-to-bottom ke cara yang lebih memasyarakat. Penciptaan sebuah komunitas mendorong ASEAN untuk bersikap

lebih inklusif dalam implementasi program-programnya. Dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesadaran dan pemahaman publik adalah faktor kunci yang menentukan apakah pillar ini akan dapat direalisasikan dengan sukses. Mengingat popularitas dari ASEAN dan kerangka-kerangkanya tidak diketahui secara signifikan di Indonesia, survei dan policy paper yang kemudian diterbitkan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai di terapkan tahun lalu.

Kata Kunci : ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia, Survei Publik.

DDC: 320.014

Nanto Sriyanto

**NEOTRADISIONALISME DAN
DISTOPIANISME: TINJAUAN ATAS
TIGA BUKU ROBERT D. KAPLAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 119-136

Artikel ini bertujuan menganalisa tulisan Robert D. Kaplan terutama yang terungkap dalam tiga publikasinya yaitu *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), dan *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). Robert D. Kaplan dengan pendekatan geopolitik dan berlatar belakang sebagai wartawan yang mengalami langsung sejumlah perubahan penting pasca-Perang Dingin membawa pesan tentang negaran gagal yang mengancam stabilitas global, utamanya negara-negara maju (2000), kebangkitan pemikiran klasik geopolitik dalam dunia yang semakin padat dengan kekuatan yang terpolarisasi (2013), dan implikasinya terhadap kawasan Asia Timur sebagai kawasan yang rawan konflik. Dari ketiga publikasi Kaplan tersebut, penulis melihat pesan senada yang berwujud dalam bentuk bangkitnya pemikiran neotradisionalisme realis dalam hubungan internasional dan distopianisme. Di lain pihak, penulis juga melihat kekurangan dalam uraiannya yang populer dan menarik minat banyak pembaca dari kalangan luas, baik akademisi, aktivis LSM, bahkan pengambil keputusan, Kaplan terbilang tidak cukup mengupas

posisi teoritisnya dibandingkan teori yang ada yang menjadi diskursus akademik. Alih-alih memunculkan paparan yang holistik sebagaimana ia sebagai pengamat lapangan dan travel journalist menempatkan diri dalam setiap publikasinya, tulisan Kaplan harus dikritisi secara akademik karena tidak cukup utuh memberikan pandangan sebagaimana klaimnya yang banyak diungkap.

Kata Kunci: Robert D. Kaplan, geopolitik, realis neotradisionalisme, holistik, travel journalist

DDC: 324.2598

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya
Wahyudi Sumari**

**INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY
IN ACHIEVING CYBERSECURITY
THROUGH ASEAN REGIONAL FORUM
ON CYBERSECURITY INITIATIVES**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 1-20

The development of information technology in the international world impacts to the use of cyberspace which covers all aspects of national life. Faced to this condition, Indonesian government needs to understand the state of cyber security and build it so that able to address any kind of threat which comes through cyberspace. In addition to internal conditions, the scope of the external noteworthy to be considered due the nature of cyber threats are transnational, cross the line of sovereignty, and has been seen as a common threat by the countries of the world. ASEAN has become a forum for Indonesia's to achieve national interests in order to support national security in the cyber field. Through the ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, defense diplomacy strategy directed to increasing mutual trust (confidence building measures) between states and reduce any potential threats that may result from the external sphere. Those efforts, resulted in an agreement in the form of point of contacts between states and a shared vision for continuous training of cybersecurity in the form of seminars and workshops to build the capacity of human resources. Strategies and efforts are analyzed through a qualitative approach and primary data were collected through interviews with 15 informants from various government

agencies. In addition, literature, journals, and related documents are also used as supporting data.

Key Words: ARF, confidence building measures, cybersecurity, defense diplomacy

DDC: 324.2598

Fathimah Fildzah Izzati

**THE "MASS LAYOFFS":
ELECTRONICS INDUSTRY VALUE
CHAIN, AEC, AND CHALLENGES FOR
LABOUR MOVEMENT IN INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 21-32

"Mass layoffs" issue has been rising in labour's political discourse in Indonesia since early 2016, following the announcement of economic policy package to face the Asean Economic Community (AEC). However, the word "mass" constructed in the issue goes against the employment data and is more closely related to political interests related to production in the electronics industry. On the other hand, labour movement issue in the electronics sector is also emerging along with the increase of labour market flexibility in this free market era, including the context of AEC. This study discusses the relationship between the mass layoffs issue, the implementation of AEC, and the labour movement in Indonesia, as well as the value chain of the electronics industry on the global level. It aims to show the role of labour movement in facing an economic scheme like AEC especially in electronics industry using value chain theory analysis. By using qualitative approach and literature review, the study found

that the labour movement in Indonesia has an excellent opportunity to build strength at the regional level by positioning themselves in the global value chain and flexible labour market regime.

Keywords: Mass layoffs, Value Chain, Electronics Industry, Labor Market Flexibility, AEC, Labour Movement.

DDC: 320.014

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

**SPACE TRANSFORMATION AND
STAKEHOLDERS PARTICIPATION:
UNDERSTANDING INVOLVEMENTS
OF INDONESIAN CIVIL SOCIETY
ORGANISATIONS AND SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES IN POST-2003
REGIONALISM IN ASEAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 33-52

This article aims to explain the participation of stakeholders in the making of ASEAN Community after the regional political-economic transformation in 2003. The establishment of ASEAN Community, which is based on three pillars (politics & security, economics, social and cultural) has led to a more complex interactions between actors in the region. Before 2003, ASEAN has been perceived only as an 'international organisation', which is centered around the 'member states' as the only influential actor in the region. Following the establishment of ASEAN Community as a new form of regionalism in 2003, this article argues that the newly-established regional community has opened up spaces for contestations between the state and other new actors in the region, most notably business actors (both big businesses and small-and-medium enterprises) and civil society organisations. Drawn upon the critical perspective, this article argues that emerging interactions between actors in the region has been enabled by the transformation of space structure in ASEAN, that opened up spaces for contestations between stakeholders in the newly-transformed regional organisation. It thus leads to the more complex understanding of regionalism in Southeast Asia. The arguments provided will also be assessed by two case studies on the regionalisation of Human

Rights NGOs and Small-and-Medium Enterprises in Indonesia.

Keywords: regionalism, participation, stakeholders, ASEAN community, southeast asia, non-government organisations, small-and-medium enterprises.

DDC: 320.014

Sandy Nur Ikfal Raharjo

**THE SOCIAL RESILIENCE OF
INDONESIAN BORDER AREA
RESIDENTS TOWARDS THE ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY:
A STUDY IN ENTIKONG SUBDISTRICT,
WEST KALIMANTAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 53-68

ASEAN Economic Community (AEC) was formally come into force at the end of 2015, and will be further transformed to be more inclusive by 2025. To deal with this issue, the residents of Entikong subdistrict at the Indonesia-Malaysia borderland should have a strong social resilience. This article explain the author's work on the social resilience assessment of the Entikong residents towards the AEC implementation. By using a modified Sustainable Livelihood Approach, the result shows that Entikong residents have four adequate social resilience assets, namely natural capital, social capital, financial capital, and political capital. Unfortunately, they are still weak on physical and human capitals. This work also shows that cross-border cooperation implementation gives positive effects to the residents. For recommendation, cross-border cooperation should be re-optimized and a special treatment of border trade in AEC should be arranged.

Keywords: Entikong, Social Resilience, Cross-border Cooperation, ASEAN Economic Community.

DDC: 320.014

Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko

***INTELLIGENCE AND
DEMOCRATIZATION IN INDONESIA
POST NEW-ORDER***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 69-82

Intelligence is an important and also complicated topic to study and understand because of its nature of secrecy. However, democracy always pushes the people to have at least basic comprehension of all government agencies, including the world of intelligence. Along with that spirit, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2P-LIPI) was conducting research entitled "Intelligence and Democratization in Indonesia Post New-Order" in 2015. This research not only discuss about intelligence theories, but also intelligence experience in transitional democracy states, brief history of Indonesian intelligence, and initial review on democratization of intelligence in Indonesia. We argue that intelligence reform in Indonesia is a requisite. Intelligence should operate under democratic system and principles. Oversight mechanism would not weaken intelligence role -in contrast, it would enhance intelligence professionalism by gaining public support, legitimacy, and adequate budget.

Keywords: *Democracy, Intelligence, Indonesia, Politics, Post New-Order*

DDC: 352.14

Awani Irewati

***PROBLEMATIC BORDER COOPERATION
ALONG THE MEKONG RIVER BETWEEN
CHINA AND ASEAN NORTHERN***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 83-104

For centuries, the Mekong river has become the center of six riparian countries's people life. Geographically, it flows through these countries for about 4,900 km. It created a 795,000 km² river basin, distributed between the Upper Mekong River Basin that is formed by China (21 percent) and Myanmar (3 percent), as well as the Lower Mekong River Basin, which comprised Laos (25 percent), Thailand (23 percent), Cambodia (20 percent), and Viet Nam (8 percent) (FAO, 2011). To fulfill their own people's needs over the Mekong River and its subregion, those riparian states have been developing some transboundary cooperation initiatives among them. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Commission [MRC] etc. are examples of the transboundary cooperation. Besides, there are some other cooperations that cover the whole or part of the Mekong subregion but do not specifically focus on Mekong River; i.e. ASEAN-China Free Trade Area and ASEAN Community. This condition creates a complexity of relationships among the cooperations in the Mekong subregion. This paper analysis some potential/existing problems i.e. a possibility that those cooperations overlap; the differences in the countries' profile seem to create different interests among them etc. The analysis is based on some field research in some places [Vietnam, Laos, Thailand] in 2015.

Keywords: *transboundary cooperation, Northern ASEAN countries, GMS, MRC, Mekong River, connectivity.*

DDC: 352.14

Khanisa

***STRATEGY TO INCREASE PUBLIC
UNDERSTANDINGS ABOUT ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 105-118

ASEAN is gradually changing their approach from top-to-bottom to a more grassroots style institution. The idea of creating a community push ASEAN to be more inclusive in implementing its programmes. In realizing ASEAN Economic Community, public awareness and undertsndings is the key factor in whether the implementation of this ASEAN's pillar will succeed. Recalling that the popularity of

ASEAN and its frameworks are not significantly known in Indonesia, the survey and the policy paper that followed aim to find out the level of public understandings about ASEAN Economic Community which started to be implemented last year.

Keywords: ASEAN, ASEAN Economic Community, Indonesia, public survey.

DDC: 320.014

Nanto Sriyanto

**NEOTRADISIONALISME DAN
DISTOPIANISME: REVIEW FOR THREE
BOOKS OF ROBERT D. KAPLAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 119-136

*This article is to analyze three publications of Robert D. Kaplan, which consist of *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), and *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). In those three publications, Kaplan utilizes geopolitical approach and embedded journalism in examining turbulent world in post-Cold War era. His arguments contain in the three books could be summarized as follows: failed states has threatened the stability the world, especially the prosperous developed countries (2000), resurgent of classical geopolitical thinking on tackling shrinking space yet polarized world politics (2013), implication on East Asia region as the volatile zone prone to conflict in the future. Based on the three publications, it could be seen that Kaplan is a proponent of neotraditional realism in IR studies, and it brings about dystopian thesis in those publications. Nevertheless it is discernible to note that despite his prosaic nature in almost of his writings that has attracted wider readership spread from academics, NGO's activists, and decision*

maker, Kaplan has not given enough space to discuss his theoretical position before he comes up with single theoretical perspective. Therefore, instead of giving a holistic picture about his subject in those three publications, his arguments and thesis which he claims based on embedded journalism and field observation should be criticised due to imbalance description and short-sighted conclusion.

Key Words: Robert D. Kaplan, geopolitic, neotradisionalism realist, holistic, travel journalist

**KETAHANAN SOSIAL WARGA PERBATASAN INDONESIA
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN:
STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT**

***THE SOCIAL RESILIENCE OF INDONESIAN BORDER AREA RESIDENTS
TOWARD THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY:
A STUDY IN ENTIKONG SUBDISTRICT, WEST KALIMANTAN***

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto No.10, Jakarta 12710
e-mail: sandy.raharjo@gmail.com

Diterima: 13 April 2016; direvisi: 18 Mei 2016; disetujui: 30 Juni 2016

Abstract

ASEAN Economic Community (AEC) was formally come into force at the end of 2015, and will be further transformed to be more inclusive by 2025. To deal with this issue, the residents of Entikong subdistrict at the Indonesia-Malaysia border area should have a strong social resilience. This article explains author's work on the social resilience assessment of the Entikong residents toward the AEC implementation. By using a modified Sustainable Livelihood Approach, the result shows that Entikong residents have four adequate social resilience assets, namely natural capital, social capital, financial capital, and political capital. Unfortunately, they are still weak on physical and human capitals. This study also shows that bilateral cooperation on border crossing and border trade between Indonesia and Malaysia give positive effects to the social and financial capitals of the Entikong residents in term of maintaining kinship and social relations, as well as improving local economy's life. To further develop social resilience of border residents, this study suggests that cross-border cooperation should be re-optimized and a special treatment of border trade in AEC should be arranged.

Keywords: *ASEAN economic community, Cross-border cooperation, Entikong, Social resilience.*

Abstrak

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi lebih inklusif pada tahun 2025. Untuk menghadapi isu tersebut, masyarakat Entikong di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia harus memiliki ketahanan sosial yang kuat. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi pelaksanaan MEA. Dengan menggunakan kerangka *Sustainable Livelihood Approach* yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa kerja sama bilateral perlintasan batas tradisional dan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia memberikan dampak positif terhadap modal sosial dan modal keuangan masyarakat Entikong, yaitu dengan menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan serta meningkatkan kehidupan ekonomi lokal. Tulisan ini menyarankan perlunya reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA demi membangun ketahanan sosial masyarakat perbatasan di masa depan.

Kata Kunci: Masyarakat ekonomi ASEAN, Kerja sama lintas batas, Entikong, Ketahanan sosial.

Pendahuluan

Tahun 2015 menjadi momentum yang penting bagi sejarah perkembangan kerja sama regional *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Mulai akhir tahun tersebut, Komunitas ASEAN secara resmi diberlakukan. Ada tiga pilar yang menopang Komunitas ASEAN, salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

MEA adalah sebuah rezim yang dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi dengan empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.¹ Melalui MEA, ASEAN diharapkan dapat bertransformasi menjadi wilayah di mana barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal dapat bergerak secara bebas,² tanpa ada hambatan tarif dan nontarif yang berarti. Untuk memfasilitasi pembentukan MEA, kesepuluh negara anggota ASEAN menyepakati Cetak Biru MEA 2015 (*ASEAN Economic Community Blueprint*) pada Agustus 2006 di Kuala Lumpur. Cetak biru ini memberi arahan kepada negara-negara anggota ASEAN berupa sasaran, kerangka waktu yang jelas, dan fleksibilitas dalam mewujudkan MEA 2015.³

Dalam pelaksanaan Cetak Biru MEA pada tahun 2007-2015, ada beberapa capaian substansial yang sudah dihasilkan. Capaian tersebut meliputi eliminasi tarif, fasilitasi perdagangan, liberalisasi dan fasilitasi investasi, perampingan dan harmonisasi kerangka aturan pasar modal, fasilitasi mobilitas tenaga kerja terampil, promosi pembangunan kerangka regional dalam kebijakan berkompetisi, perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual, promosi keterhubungan, penyempitan kesenjangan pembangunan, dan penguatan hubungan ASEAN dengan pihak-pihak luar.⁴

¹ ASEAN, *ASEAN Economic Community Blueprint*, (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2008), hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Kementerian Luar Negeri RI, "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", diakses dari [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/MasyarakatEkonomiASEAN\(MEA\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/MasyarakatEkonomiASEAN(MEA).aspx), pada 30 Maret 2016.

⁴ ASEAN, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*,

Sejalan dengan pencapaian tersebut, ASEAN kemudian menetapkan visi MEA ke depan, salah satunya adalah menciptakan komunitas yang berdaya tahan (*resilient*), inklusif, *people-oriented*, dan *people-centred*, yang melahirkan pembangunan yang adil dan pertumbuhan yang inklusif.⁵ Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkanlah Cetak Biru MEA 2025.

Salah satu hal paling menonjol yang membedakan antara Cetak Biru MEA tahun 2015 dan tahun 2025 adalah ditetapkannya "A Resilient, Inclusive, People-Oriented, and People-Centred ASEAN" sebagai satu diantara lima karakteristik utama MEA 2025.⁶ Hal ini menyiratkan semangat agar ASEAN tidak hanya bermain dalam level antarpemerintah, tetapi juga menguatkan pentingnya hubungan antarmasyarakat.

Untuk melihat bagaimana intensitas hubungan antarmasyarakat ASEAN, kawasan perbatasan darat merupakan wilayah yang cocok untuk dijadikan lokasi pengamatan. Di kawasan ini, kedekatan geografis membuat warga dari dua negara yang berbatasan dapat berinteraksi secara lebih mudah. Mereka dapat berkunjung ke wilayah negara tetangga hanya dengan berjalan kaki, berbeda dengan warga di perbatasan laut yang harus menggunakan perahu atau alat transportasi air lainnya. Selain itu, warga perbatasan darat dua negara juga biasanya memiliki kedekatan hubungan keluarga, budaya, dan bahasa, sehingga aktivitas lintas batas lumrah dilakukan.

Indonesia sendiri berbatasan darat dengan tiga negara, di mana salah satunya adalah anggota ASEAN, yaitu Malaysia. Perbatasan darat Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2.004 km,⁷ yang tersebar di Provinsi Kalimantan

(Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2015), hlm. 1.

⁵ ASEAN, *Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together*, (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2015), hlm. 15.

⁶ *Op.cit.*, hlm. 1

⁷ Agung Mulyana, 2012, "Kebijakan Umum dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan, presentasi dalam *Diskusi Masalah, Kebijakan, dan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara*, Jakarta, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dikutip dari Sandy Nur Ikfal Raharjo, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif di Kecamatan Entikong)", dalam *Widyariset* Vol.16, no.1, April 2013.

Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara di sisi Indonesia, serta negara bagian Serawak dan Sabah di sisi Malaysia. Di sepanjang perbatasan tersebut, ada tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang akan dibangun/dikembangkan selama periode 2015-2019, yaitu PLBN Entikong, Aruk, Nanga Badau, Jasa, Jagoi Babang (Kalimantan Barat), Sei Pancang, dan Liem Hie Djung (Kalimantan Utara).⁸ Dari 7 PLBN tersebut, tiga diantaranya masuk dalam kategori PLBN Terpadu yang harus dipercepat pembangunannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, yaitu Aruk, Entikong, dan Nanga Badau.⁹ Namun untuk tahun 2015-2016 ini, pembangunan yang sedang berjalan adalah pengembangan PLB Entikong menjadi PLBN Terpadu Entikong yang diharapkan dapat beroperasi per 1 Januari 2017.¹⁰ PLBN ini akan menjadi pintu gerbang dan sistem utama yang melayani aktivitas lintas batas masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia.¹¹

Bagi masyarakat perbatasan Entikong, implementasi MEA merupakan sebuah perubahan kebijakan politik yang dapat mempengaruhi, bahkan merubah tatanan kehidupan mereka. MEA adalah peluang untuk dapat mengembangkan komunitas mereka menjadi lebih sejahtera, tetapi juga dapat berarti tantangan/ancaman, terutama bila mereka tidak siap menghadapi kompetisi yang lebih bebas dengan negara tetangga. Tulisan ini mengkaji seberapa kuat ketahanan sosial masyarakat perbatasan Entikong dalam menghadapi rezim MEA 2025 yang diarahkan lebih integratif, inklusif dan berorientasi pada peran aktif masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan

⁸ Badan Nasional Pengelola Perbatasan, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019*, (Jakarta: BNPP, 2015), hlm. 384.

⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Jakarta, 28 April 2015.

¹⁰ Yohanes Kurnia Irawan, "Adopsi Desain Lokal, PLBN Entikong Lebih Megah Dibanding Malaysia", *Kompas*, 24 Maret 2016, diakses dari <http://properti.kompas.com/read/2016/03/24/060000821/Adopsi.Desain.Lokal.PLBN.Entikong.Lebih.Megah.Dibanding.Malaysia>, pada 31 Maret 2016.

¹¹ Badan Nasional Pengelola Perbatasan, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019*, (Jakarta: BNPP, 2015), hlm. 221.

dapat menunjukkan aspek-aspek ketahanan sosial mana saja yang dapat dioptimalkan untuk mengambil keuntungan dari MEA, dan aspek ketahanan sosial mana saja yang masih lemah dan perlu diperkuat, sehingga masyarakat perbatasan Entikong akan lebih siap menghadapi tahun 2025.

Tinjauan Pustaka: Ketahanan Sosial dan Masyarakat Perbatasan

Ketahanan sosial, menurut Adger, dapat diartikan sebagai kemampuan kelompok atau masyarakat untuk dapat menahan gangguan dari luar atau perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang dapat mengubah tatanan masyarakat atau struktur sosial.¹² Kemampuan masyarakat yang dimaksud bukan hanya untuk mengatasi risiko dan dampak yang ada, tetapi juga daya pulih/kemampuan untuk bangkit dengan cepat terhadap perubahan yang ada, bahkan terus mengalami pertumbuhan.¹³ Lebih lanjut, Keck dan Sakdapolrak memperinci ketahanan sosial dalam tiga dimensi/tahap, yaitu kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang ada (*coping capacities*), kemampuan untuk belajar dari masa lalu dan menyesuaikan diri agar dapat menerima tantangan di masa mendatang (*adaptive capacities*), serta kemampuan untuk menciptakan kelembagaan yang dapat mendorong ketahanan masyarakat yang berkelanjutan di masa kini dan masa depan (*transformative capacities*).¹⁴

Untuk mengukur ketahanan sosial suatu masyarakat, salah satu metode yang biasa dipakai adalah *Sustainable Livelihood Approach* atau *Sustainable Livelihood Theory*. Pendekatan ini mengukur ketahanan sosial berdasarkan lima kategori aset/modal yang dimilikinya. *Pertama*, modal alam (lingkungan), yang meliputi tanah, air, biodiversitas, sumber daya

¹² Neil W. Adger, "Social and Ecological Resilience: Are They Related?", dalam *Progress in Human Geography* Vol. 24 No. 3, 2000, hlm. 349.

¹³ Community & Regional Resilience Institute, *Definitions of Community Resilience: An Analysis (A CARRI Report)*, (CARRI dan Meridian Institute, 2013). Laporan dapat diakses dari <http://www.resilientus.org/wp-content/uploads/2013/08/definitions-of-community-resilience.pdf>.

¹⁴ Markus keck and Patrick Sakdapolrak, "What is Social Resilience?Lessons Learned and Ways Forward", *Erdkunde* Vol. 67 No. 1, 2013, hlm. 5-19.

lingkungan, dan lain-lain. *Kedua*, modal fisik berupa infrastruktur dasar seperti air, sanitasi, energi, transportasi, komunikasi, perumahan, dan alat-alat produksi. *Ketiga*, modal manusia berupa kesehatan, pengetahuan, keahlian, informasi, dan kemampuan untuk bekerja. *Keempat*, modal sosial, yang meliputi hubungan saling percaya, keanggotaan dalam sebuah kelompok, jaringan, dan lain-lain. *Kelima*, modal keuangan, seperti pendapatan rutin, tabungan, dan suplai kredit.¹⁵ Pada perkembangannya, ada beberapa akademisi yang memodifikasi *Sustainable Livelihood Approach*, salah satunya adalah McLeod yang menambahkan modal pengetahuan kelembagaan dan modal politik/pemerintahan.¹⁶

Selain ketahanan sosial, kajian ini juga menggunakan terminologi masyarakat perbatasan sebagai salah satu fokusnya. Dalam berbagai peraturan tentang perbatasan di Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, maupun Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2015, tidak ditemukan definisi tentang masyarakat perbatasan. Namun dalam dokumen perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia—*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing 2006*—, ada ketentuan yang memuat klasifikasi/persyaratan mengenai warga perbatasan yang berhak menerima fasilitas khusus pas lintas batas, yaitu penduduk yang sah dari Indonesia dan Malaysia yang tinggal di kawasan perbatasan.¹⁷ Kawasan perbatasan sendiri, Menurut Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan

Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2015, adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.¹⁸ Dengan kata lain, masyarakat perbatasan (darat) adalah penduduk yang sah yang menetap di kecamatan perbatasan. Biasanya, keabsahan penduduk tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen catatan sipil lainnya.

Metodologi

Tulisan ini merupakan kajian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan lebih berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Namun demikian, beberapa informasi menggunakan data primer dari penelitian-penelitian penulis sebelumnya di lokasi yang sama, yaitu Entikong. Kecamatan Entikong dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan. Pertama, ia merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung di darat dengan Malaysia sebagai negara anggota ASEAN. Sementara dua negara lainnya yang juga memiliki perbatasan darat dengan Indonesia—yaitu Papua Nugini dan Timor Leste—bukan merupakan anggota ASEAN. Kedua, di kecamatan ini terdapat Pos Lintas Batas Negara Terpadu yang relatif paling maju dibanding dua PLBN terpadu lainnya (Aruk dan Nanga Badau) di sepanjang perbatasan darat di Pulau Kalimantan.

Pengakuan Kecamatan Entikong sebagai kawasan perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia dapat ditelusuri dari lampiran A (Annex A) dalam dokumen *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing 2006*. Posisi Entikong sebagai kawasan perbatasan juga ditegaskan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN), di mana Entikong ditetapkan sebagai salah satu dari 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

¹⁵ Lihat Mike Majale, "Towards Pro-Poor Regulatory Guidelines for Urban Upgrading", dalam *International Workshop on Regulatory Guidelines for Urban Upgrading*, Bourton-On-Dunsmore, 17-18 Mei 2001. Artikel dapat diakses dari http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/Urbanisation/R7850_Majale_RGUUI_Review.pdf.

¹⁶ R. McLeod, "The Impact of Regulations and Procedures on the Livelihoods and Asset Base of the Urban Poor: A Financial Perspective", dalam *International Workshop on Regulatory Guidelines for Urban Upgrading*, Bourton-on-Dunsmore, 17-18 Mei 2001.

¹⁷ Lihat pasal 2 *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing*, Bukit Tinggi, 12 Januari 2006.

¹⁸ Lihat pasal 1 ayat 10 *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2015*.

guna mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.¹⁹ Dengan justifikasi tersebut, kajian tentang ketahanan sosial masyarakat di Kecamatan Entikong ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi kawasan perbatasan darat Indonesia lainnya.

Kondisi Ketahanan Sosial Masyarakat Entikong: Faktor Internal

Kecamatan Entikong terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Wilayah ini berbatasan dengan Subdistrik Tebedu, Distrik Serian, Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Dengan wilayah seluas 506,89 km², kecamatan ini dihuni oleh 16.652 penduduk (2014). Populasinya tersebar ke lima desa, yaitu Nekan, Semanget, Entikong, Suruh Tembawang, dan Pala Pasang.²⁰



Sumber: BPS Kabupaten Sanggau, 2015), hlm. 22.

Gambar 1. Peta Kawasan Perbatasan Entikong-Tebedu

Di sisi Malaysia, terdapat Subdistrik (Daerah Kecil) Tebedu yang berbagi garis batas sepanjang sekitar 44 km dengan wilayah Indonesia. Dengan luas 421 km², Tebedu dihuni oleh 11.434

¹⁹ Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional hlm. 6&40.

²⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, *Kecamatan Entikong dalam Angka 2015*, (Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau, 2015), hlm. 22.

penduduk. Mereka tersebar di 29 kampung/ rumah panjang.²¹ Dari data ini, terlihat bahwa populasi warga Entikong lebih banyak dibanding warga Tebedu.

Namun demikian, besarnya populasi tidak serta merta membuat masyarakat Entikong lebih memiliki ketahanan sosial dibanding warga Tebedu Malaysia. Berdasarkan konsep *Sustainable Livelihood Approach* yang dijelaskan sebelumnya, ketahanan sosial masyarakat Entikong dapat diukur dengan beberapa jenis aset/modal yang dimilikinya, di mana dalam tulisan ini penulis menggunakan enam modal. Modal-modal tersebut lebih merupakan sesuatu yang bersumber dari internal masyarakat Entikong sendiri.

a. Modal Alam (Lingkungan)

Modal alam (lingkungan) meliputi tanah, air, biodiversitas, sumber daya lingkungan, dan lain-lain. Untuk ketersediaan tanah sebagai sumber penghidupan, dari total luas kecamatan Entikong 50.689 ha (506,89 km²), sekitar 78,9%-nya digunakan untuk pertanian bukan sawah, yaitu kebun warga, ladang warga, perkebunan, dan hutan rakyat (2014). Sisanya, warga mengusahakan sawah irigasi dan tadah hujan.²² Komposisi tersebut masih cukup menggembirakan karena sebagian besar lahan tersebut masih dimiliki dan diusahakan sendiri oleh warga lokal. Mereka mengandalkan lada (*sahang*) dan karet untuk ditanam di kebun/ ladang mereka.

Namun, perlu diwaspadai perkembangan perkebunan kelapa sawit dari perusahaan besar yang sekarang sudah mulai merambah wilayah Entikong, bahkan hingga di daerah aliran Sungai Sekayam.²³ Pada tahun 2014, luas

²¹ Pejabat Daerah Serian, Malaysia, "Maklumat Demografi & Kemudahan Awam Pejabat Daerah Kecil Tebedu", diakses dari http://www.seriando.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=121&menu_id=0&sub_id=182, pada 6 April 2016.

²² Diolah kembali dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, *Kecamatan Entikong dalam Angka 2015*, (Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau, 2015), hlm. 63.

²³ Untuk informasi tentang potensi dampak perambahan perkebunan sawit di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, silakan baca Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands dan the Swedish Society for Nature Conservation,

perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 1.275 ha dari sebelumnya 600 ha pada tahun 2013. Luas kebun kelapa sawit sudah jauh di atas luas kebun lada yaitu 877 ha yang mengalami penurunan dari sebelumnya 937,30 ha pada tahun 2013. Padahal, kebun lada menyerap tenaga kerja paling banyak, yaitu 43,95% dari total petani di Entikong. Sementara jumlah petani di perkebunan sawit hanya tercatat 3,52%.²⁴ Perlu ada aturan pengelolaan perkebunan lada rakyat dan perkebunan kelapa sawit perusahaan besar, agar warga lokal Entikong dapat menghadapi tahun 2025 dengan lebih siap.

Untuk ketersediaan air, dari lima desa, tiga diantaranya merupakan daerah aliran sungai, yaitu Suruh Tembawang, Pala Pasang, dan Entikong.²⁵ Sementara untuk Desa Nekan, kondisi topografinya terletak di lereng/punggung bukit yang masih subur dan terdapat beberapa aliran sungai. Oleh karena itu, warga Entikong secara umum tidak memiliki kesulitan dalam mengakses air. Biasanya air disalurkan dari sungai yang terletak di bukit ke pemukiman warga melalui pipa-pipa.

Namun demikian, kehadiran beberapa tambang emas di pinggir sungai disinyalir membuat kualitas air menjadi keruh. Tambang emas tersebut juga menggunakan merkuri untuk memisahkan bijih emas dari tanah dan zat lainnya, sehingga mencemari air sungai. Berdasarkan pengalaman di lapangan, mandi dengan air yang tercemar tersebut menyebabkan gatal-gatal di badan.

Hal lain yang juga perlu dicermati adalah kebiasaan warga untuk memandikan dan membuang kotoran ternak babi mereka ke sungai. Babi biasanya dibiarkan berkeliaran di sekitar rumah dan pinggiran sungai. Padahal, air tersebut juga digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan memasak. Jika penambangan emas dan peternakan babi ini dapat dikelola secara lebih baik dengan langkah-langkah preventif terhadap pencemaran air, maka

akses terhadap air ini dapat menjadi salah satu aspek modal yang kuat bagi ketahanan sosial masyarakat Entikong. Apalagi, air merupakan unsur utama pembentuk kehidupan.

b. Modal Fisik

Modal fisik adalah ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik dan komunikasi. Pada aspek transportasi, tiga desa dapat diakses dengan jalan darat, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Sementara itu, dua desa yang terjauh dari kecamatan, Pala Pasang (30 km) dan Suruh Tembawang (42 km), belum tersedia akses jalan darat. Warga hanya dapat menggunakan transportasi sungai (perahu motor)²⁶ dengan waktu tempuh minimal 4 jam. Biaya sewa perahu mulai dari 1-1,4 juta rupiah,²⁷ atau antara 50 ribu sampai 100 ribu perpenumpang untuk sekali jalan. Sulit dan mahalnya transportasi menyebabkan pelayanan pemerintahan terhambat dan distribusi barang-barang kebutuhan rumah tangga terhadap warga dua desa tersebut menjadi terbatas. Akibatnya, mereka lebih bergantung pada pelayanan dan distribusi barang dari Malaysia yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 3 jam.

Saat ini, pemerintah sedang membangun jalan paralel perbatasan sepanjang 1.755 km yang membentang dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara. Di Kalimantan Barat pemerintah telah membangun jalan paralel tersebut sepanjang 726 km sejak Agustus 2015 dan ditargetkan selesai pada 2018. Selain itu, akan dilakukan pula pelebaran jalan utama Entikong-Balai Karangan dari 25 m menjadi 50 m dengan 4 jalur, dalam rangka menyiapkan PLBN Entikong sebagai urat nadi Kalimantan Barat menghadapi MEA.²⁸ Walaupun terkesan telat

The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project, (Amsterdam: AIDEnvironment, 2006).

²⁴ Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, *Op. cit.*, hlm. 175&178.

²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, *Ibid.*, hlm. 6.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁷ Sandy Nur Ikfal Raharjo, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif di kecamatan Entikong)", *Widyariset*, Vol. 16 No.1, April 2013, hlm. 74.

²⁸ Dana Aditiasari, "Jalan di Perbatasan Kalimantan-Malaysia 1.770 Km Harus Tersambung di 2018", 16 Januari 2016, diakses dari <http://m.detik.com/finance/read/2016/01/16/165019/3120081/4/jalan-di-perbatasan-kalimantan-malaysia-1770-km-harus-tersambung-di-2018>, pada 10 April 2016.

dibangun ketika MEA sudah resmi diberlakukan, pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar arus barang dan orang baik ke dalam negeri maupun ke negara tetangga. Semakin baiknya akses transportasi darat ini diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial warga perbatasan Entikong.

Pada aspek energi listrik, data tahun 2014 menunjukkan bahwa baru tiga desa yang dapat menikmati aliran listrik PLN, yaitu Entikong, Semanget, dan Nekan. Itu pun tidak semua rumah menjadi pelanggan PLN, di mana dari 610 kepala keluarga di Nekan, hanya 178 rumah yang tercatat menjadi pelanggan.²⁹ Sementara di Pala Pasang dan Suruh Tembawang, PLN belum dapat memasok listrik karena kendala infrastruktur. Untuk dapat menikmati listrik, sebagian warga dua desa tersebut menggunakan panel tenaga surya bantuan pemerintah maupun genset berbahan bakar solar. Namun, masih banyak warga yang hanya mengandalkan pelita untuk menerangi rumah mereka di malam hari. Pembukaan jalan paralel perbatasan menjadi harapan baru bagi warga bahwa PLN dapat segera masuk ke desa mereka.

Untuk infrastruktur komunikasi, masyarakat perbatasan Entikong sudah dilayani oleh beberapa operator seluler nasional seperti Telkomsel dan Indosat. Namun, jaringan tersebut belum menjangkau desa-desa ujung Pala Pasang dan Suruh Tembawang. Pada tahun 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebenarnya sudah memberikan bantuan pemancar sinyal seluler Telkomsel bertenaga panel surya. Tetapi ketika alat tersebut rusak, aparat desa tidak dapat memperbaikinya, sehingga terbengkalai dan tidak dapat digunakan. Untuk akses informasi searah, warga Entikong di dua desa tersebut sudah banyak yang mempunyai radio dan televisi berpemancar parabola, yaitu 147 parabola di Pala Pasang dan 500 parabola di Suruh Tembawang pada tahun 2014.³⁰ Pembangunan jalan paralel perbatasan menjadi harapan bagi warga Entikong, khususnya di dua desa tersebut, untuk dapat menjadi pembuka jalan dibangunnya

²⁹ Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, *Kecamatan Entikong dalam Angka 2015*, (Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau, 2015), hlm. 20&77.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

Base Transceiver Station (BTS) telepon seluler, sehingga mereka dapat lebih mudah melakukan komunikasi dua arah.

c. Modal Manusia

Modal manusia menggambarkan kualitas sumber daya manusia warga Entikong seperti tingkat pengetahuan/pendidikan, kesehatan, dan kemampuan untuk bekerja. Dari segi pendidikan, data tahun 2009/2010 menunjukkan bahwa sebagian besar (43,24%) warga Entikong berusia di atas 15 tahun hanya lulusan SD, diikuti warga yang tidak lulus SD sebesar 31,29%. Pada tahun 2014, penulis tidak menemukan data tingkat pendidikan Kecamatan Entikong.³¹ Namun bila merujuk pada data Kabupaten Sanggau dalam Angka, tahun 2014, jumlah lulusan SD masih mendominasi tingkat pendidikan penduduk Sanggau usia 15 tahun ke atas yang bekerja (32,72%), diikuti dengan 30,93% warga yang tidak tamat SD. Walaupun ada peningkatan pendidikan, tetapi kondisi tersebut masih belum ideal, karena lebih dari separuh warga masih berpendidikan SD dan tidak lulus SD. Padahal, tingkat pendidikan sangat penting sebagai modal membangun daya saing dalam rangka menghadapi kompetisi yang akan semakin ketat dalam MEA. Hal ini terkait dengan diberlakukannya *Mutual Recognition Arrangements* yang mengharmonisasi peraturan serta pengakuan bersama standar kompetensi untuk delapan profesi. Maknanya, pasar tenaga kerja untuk bidang pekerjaan tersebut dibuka secara bebas untuk seluruh warga ASEAN, sehingga para profesional tersebut tidak hanya bersaing dengan warga negara sendiri dalam mendapatkan pekerjaan, tetapi juga dengan profesional dari sembilan negara ASEAN yang lain. Kedelapan profesi tersebut adalah insinyur, arsitektur, perawat, dokter, dokter gigi, akuntan, *land surveyor*, dan pekerja pariwisata.³²

³¹ Dalam data BPS Kecamatan Entikong dalam Angka 2015, tabel data pendidikan hanya berupa jumlah guru dan murid yang masih dan baru lulus sekolah, tetapi tidak menyajikan tingkat pendidikan seluruh warga Entikong secara umum.

³² Kementerian Luar Negeri RI, "Sambut MEA, Kemlu Adakan Forum Kajian 'Strategi Tenaga Profesional Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN'", diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Fkkl-n-uu.aspx>, pada 3 Mei 2016.

Untuk tingkat kesehatan, warga Entikong dapat mengakses fasilitas puskesmas di kecamatan dan pondok bersalin desa (polindes) di masing-masing desa. Namun, dokter hanya ada di kecamatan, sementara yang ada di polindes adalah bidan/perawat. Data 2014 menunjukkan bahwa 26 dari 31 bidan/perawat, 26 di antaranya berada di Desa Entikong. Sementara di Desa Pala Pasang tidak ada bidang yang melayani.³³ Isu pemerataan tenaga kesehatan ini penting untuk difasilitasi ke depan, agar tingkat kesehatan warga Kecamatan Entikong dapat lebih merata.

Untuk akses ke puskesmas, 89% pasien menggunakan jamkesda, 8,76% menggunakan askes/BPJS/jamkesmas, sisanya membayar secara pribadi.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa jaminan pemerintah terhadap pelayanan kesehatan warganya sudah cukup baik. Demikian pula untuk penanganan bayi usia di bawah satu tahun, semuanya mengikuti kegiatan posyandu, yang dengan kata lain bayi-bayi di Entikong terpantau perkembangan kesehatannya.

Pada aspek kemampuan warga untuk bekerja, rasio beban tanggungan di Kecamatan Entikong adalah 52,03. Artinya, setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 52 orang nonproduktif. Penduduk usia produktif adalah 15-64 tahun. Hal ini terjadi karena komposisi penduduk usia produktif mencapai 65,78% dari total penduduk Entikong.³⁵ Dengan kata lain, sebagian besar warga Entikong sebenarnya siap untuk bekerja. Namun demikian, tingkat pendidikan yang rendah, yaitu hanya lulus SD, membuat lapangan pekerjaan yang dapat mereka masuki juga terbatas. Sebagian besar warga akhirnya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan tinggi dan keahlian khusus. Pilihan lainnya adalah dengan menjadi pekerja tambang emas atau menjadi TKI di Malaysia. Jika kondisinya terus seperti ini, sangat sulit bagi warga Entikong untuk dapat memasuki pasar tenaga kerja profesional di

negara-negara ASEAN karena kualifikasi yang tidak terpenuhi. Dengan demikian, kesempatan untuk memperbaiki tingkat pendapatan dan perekonomian keluarga pun semakin sempit dan terbatas. Hal ini menyiratkan pentingnya perbaikan pendidikan untuk memperbaiki modal manusia Entikong yang masih rendah dan terbatas.

d. Modal Sosial

Modal sosial ialah terjalinnya hubungan saling percaya di dalam masyarakat Entikong sendiri maupun dengan masyarakat lain, di mana jaringan untuk dapat saling membantu terbentuk. Jika dilihat dari komposisi penduduk, masyarakat Kecamatan Entikong terdiri atas berbagai etnis, yaitu Dayak Bidayuh yang mendiami Nekan, Semanget, Suruh Tembawang, dan Pala Pasang, serta orang-orang Melayu dan Jawa yang mendiami Desa Entikong. Komposisi etnis ini mirip dengan komposisi etnis yang ada di wilayah negara tetangga, Tebedu. Etnis Dayak Bidayuh menjadi mayoritas dengan 93,73%, diikuti dengan etnis Melayu/Bumiputera Muslim sebesar 3,85%.³⁶

Sebagai konsekuensi dari fakta di atas, banyak warga Kecamatan Entikong yang memiliki hubungan keluarga dengan Warga Tebedu Malaysia. Ketika ada acara-acara adat seperti pernikahan, kematian, dan pesta adat *gawai*, mereka biasanya saling berkunjung, baik melalui pintu resmi maupun melalui jalur tikus. Secara statistik, hubungan sosial yang kuat tersebut terlihat dari besarnya jumlah warga yang melintas batas di Pos Lintas Batas Negara Entikong. Di PLBN ini, warga dapat menggunakan dua jenis dokumen, yaitu paspor untuk WNI dan WN Malaysia secara umum, serta pas lintas batas yang khusus dimiliki oleh warga Entikong dan Tebedu. Untuk tahun 2014, ada 8.105 kali pelintasan dengan menggunakan pas lintas batas. Waktu pelintasan yang paling padat adalah di bulan Mei. Hal ini diindikasikan terjadi karena pada bulan tersebut pesta adat

³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2015, *Kecamatan Entikong dalam Angka 2015*, *Ibid.*, hlm. 43.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 44&46.

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, *Statistik Daerah Kecamatan Entikong 2015*, (Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau, 2015), hlm. 4.

³⁶ Pejabat Daerah Serian, Malaysia, "Maklumat Demografi & Kemudahan Awam Pejabat Daerah Kecil Tebedu", diakses dari http://www.seriando.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=121&menu_id=0&sub_id=182, pada 6 April 2016.

gawai biasa dilaksanakan. Lintas batas tersebut lebih banyak dilakukan oleh warga Entikong, yaitu 91,62%.³⁷

Data di atas menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat Entikong, dalam konteks hubungannya dengan warga Tebedu, cukup baik. Modal sosial tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan kunjungan keluarga dan adat, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi. Banyak warga Entikong berbelanja kebutuhan harian ke sana, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kembali. Hal yang perlu diperhatikan adalah, kebergantungan yang besar terhadap barang-barang dari Malaysia harus dikelola sedemikian rupa, agar jangan sampai hal ini menjadi titik rentan masyarakat Kecamatan Entikong bila sewaktu-waktu jalur lintas batas dihentikan. Ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu memperlancar arus barang dari dalam negeri—baik dari ibukota kabupaten, Sanggau, maupun dari ibukota provinsi, Pontianak—, atau dapat pula menguatkan kerja sama dengan Malaysia untuk menjamin fasilitasi kegiatan lintas batas dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

e. Modal Keuangan

Seperti disebutkan dalam penjelasan tentang modal manusia, sebagian besar penduduk Kecamatan Entikong bekerja di sektor pertanian/perkebunan/peternakan. Dengan menggunakan data Kabupaten Sanggau tahun 2014, Sektor ini juga menjadi penyumbang PDRB terbesar, yaitu 35,59%, baru disusul dengan industri pengolahan sebesar 19,46%.³⁸ Untuk pendapatan perkapita Kecamatan Entikong, penulis tidak menemukan datanya. Oleh karena itu, digunakan pendapatan perkapita Kabupaten Sanggau pada tahun 2014, yang dihitung dari Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 dibagi jumlah penduduk, yaitu sebesar Rp24.272.244 pertahun, atau sekitar Rp2.022.687 perbulan.³⁹

³⁷ Data diolah kembali dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, *Statistik Lalu Lintas WNI dan WNA Kabupaten Sanggau 2014*, (Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau, 2015), hlm. 20-21.

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, *Kabupaten Sanggau dalam Angka 2015*, (Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau, 2015), hlm. 358.

³⁹ Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau,

Angka pendapatan ini jauh lebih besar dari rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk makanan dan nonmakanan, yaitu Rp649.722.⁴⁰ Artinya, tingkat pendapatan warga lebih besar dari tingkat pengeluarannya, sehingga ada potensi untuk menabung.

Namun demikian, jika dilihat dari jumlah penabung di bank-bank umum dan bank perkreditan rakyat, jumlah penabung di Kabupaten Sanggau pada tahun 2014 masih sangat sedikit, yaitu hanya 1.365 rekening saja.⁴¹ Dengan menggunakan asumsi rasio jumlah penduduk Entikong terhadap jumlah penduduk Sanggau yang mencapai 3,79%, maka rata-rata pemilik tabungan bank di Entikong hanya mencapai 52 orang saja. Rendahnya penabung ini kemungkinan disebabkan oleh minimnya bank umum yang beroperasi di Kecamatan Entikong, yaitu 4 buah dan hanya terletak di kota kecamatan.

Asumsi lainnya adalah, intensitas interaksi masyarakat Kecamatan Entikong dengan Malaysia menyebabkan banyak warga yang menyimpan uangnya dalam bentuk ringgit. Hal ini memudahkan mereka ketika akan berbelanja dengan nilai tukar yang dianggap lebih stabil dibanding rupiah. Apalagi, toko dan kios di Entikong kebanyakan juga menerima ringgit sebagai alat pembayaran.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa modal keuangan masyarakat Kecamatan Entikong cukup baik, di mana pendapatan perkapita lebih besar dibanding pengeluaran perkapita. Penyimpanan uang dalam dua mata uang, rupiah dan ringgit, sebenarnya juga merupakan kelebihan, di mana mereka dapat melakukan transaksi di dua negara sekaligus. Diversifikasi simpanan dalam dua mata uang ini juga mengurangi potensi risikonya nilai simpanan akibat inflasi/deflasi salah satu mata uang.

Kabupaten Sanggau dalam Angka 2015, Ibid., hlm. 356&376.

⁴⁰ Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2015, *Kabupaten Sanggau dalam Angka 2015, Ibid.*, hlm. 340-341.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 320.

f. Modal Politik/Pemerintahan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu masyarakat adalah pemerintahan yang mengatur dan menjalankan berbagai kebijakan untuk kepentingan rakyatnya. Warga Entikong sendiri dinaungi oleh pemerintahan Kecamatan Entikong yang terbagi menjadi lima desa. Masing-masing desa masih terbagi lagi menjadi beberapa dusun dan rukun tetangga (RT). Sistem seperti ini sebenarnya baik karena pengawasan terhadap kepentingan warga menjadi berlapis. Selain itu, masing-masing desa juga dikelola oleh kepala desa, sekretaris desa, dan para kepala urusan (kaur).

Namun demikian dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Pertama, hanya tiga dari lima desa yang memiliki sekretaris desa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Entikong, Nekan, dan Pala Pasang. Padahal, sekretaris desa memiliki peran penting bagi jalannya pemerintahan desa dan komunikasinya dengan pemerintah kecamatan. Kedua, jauhnya jarak dan keterbatasan transportasi dari Desa Pala Pasang dan Suruh Tembawang membuat pelayanan pembuatan dokumen catatan sipil seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran menjadi terhambat. Pengakuan dari Kepala Desa Suruh Tembawang kepada peneliti pada tahun 2010 menyebutkan bahwa ia biasanya ke kota kecamatan sebulan sekali, dan ketika sudah di kota kecamatan akan lama tinggal di sana untuk memudahkan urusan administrasi yang banyak dilakukan di kecamatan. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi tidak optimal. Namun demikian, kendala ini diharapkan dapat diatasi dengan pembangunan jalan paralel perbatasan yang sedang dalam tahap pengerjaan sejak tahun 2015.

Hal yang menguntungkan adalah, status Kecamatan Entikong sebagai kawasan perbatasan menjadikan pemerintah pusat banyak memberikan perhatian. Bentuk perhatian tersebut misalnya menjadikan Kecamatan Entikong sebagai salah satu dari 26 Pusat Kawasan Strategis Nasional.⁴² Selain itu, Entikong juga ditetapkan sebagai

⁴² Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional hlm. 40.

lokasi prioritas (lokpri) I dalam Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2025.⁴³ Dukungan kelembagaan dari pemerintah pusat ini dapat menjadi modal politik yang besar bagi ketahanan sosial masyarakat Entikong.

Selain perhatian dalam bentuk bantuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur seperti pasar perbatasan, pemerintah juga memberi perhatian pada aspek pertahanan dan keamanan. Hal ini terkait erat dengan karakter perbatasan yang dekat dengan wilayah lain, sehingga sering menjadi pintu gerbang bagi masuknya berbagai ancaman keamanan dari luar, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter. Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Entikong sebagai dasar utama jalannya pembangunan, pemerintah menempatkan pasukan satuan tugas pengamanan perbatasan (satgas pamtas). Mereka ditempatkan di Pos Komando Taktis Gabungan Bersama (Gagma) Malaysia-Indonesia Entikong.⁴⁴ Di pos ini, pasukan TNI ditempatkan bersama dengan pasukan Tentera Diraja Malaysia (TDM).⁴⁵ Mereka bertugas menciptakan stabilitas keamanan, menjamin keutuhan wilayah melalui pemeliharaan patok batas, dan mencegah pelanggaran lintas batas, penyelundupan, dan lain lain.⁴⁶

Namun demikian, hal yang patut dicermati adalah efektivitas program dan bantuan pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan Entikong. Sering terjadi kasus bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan warga, sehingga bantuan tersebut kurang efektif. Hal ini dapat terjadi karena penetapan kebijakan, program, dan bantuan dari pemerintah pusat kepada Entikong lebih sering dirumuskan berdasarkan apa yang menurut Jakarta baik, padahal perspektif

⁴³ Badan Nasional Pengelola Perbatasan, *Desain Besar Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*, (Jakarta: BNPP, 2011), hlm. 71.

⁴⁴ Dinas Sejarah Angkatan Darat, *Peranan TNI AD dalam Pengamanan Perbatasan NKRI*, (Bandung: Disjarah AD, 2012), hlm. 83-84.

⁴⁵ Lombok Post, "Menengok Keakraban Tentara Indonesia dan Malaysia di Garis Perbatasan", 5 Oktober 2015, diakses dari <http://www.lombokpost.net/2015/10/05/seperti-keluarga-selalu-terharu-saat-berpisah/>, pada 13 April 2016.

⁴⁶ Dinas Sejarah Angkatan Darat, *Op. cit.*, hlm. 81.

masyarakat Entikong belum tentu demikian. Dengan kata lain, kebijakan tersebut masih bersifat *top-down*. Jika kebijakan tersebut dirumuskan melalui pendekatan dari bawah (*bottom-up*), mendengarkan aspirasi warga dan aparat lokal, maka diharapkan kebijakan yang dijalankan akan lebih tepat sasaran.

Dari penjelasan di atas, dapat diklasifikasi modal/aset ketahanan sosial yang kuat dan yang lemah. Masyarakat Kecamatan Entikong memiliki kekuatan dalam modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal pemerintah. Untuk modal alam, warga Entikong memiliki akses yang cukup baik terhadap tanah dan sumber daya air. Untuk modal sosial, kedekatan hubungan adat dan budaya antara warga Entikong dengan warga Tebedu menjadi dasar bagi ramainya aktivitas lintas batas. Untuk modal keuangan, rata-rata pendapatan perkapita warga di sana lebih tinggi dibanding rata-rata pengeluaran perkapita, sehingga ada kelebihan dana yang dapat ditabung. Selain itu, diversifikasi kepemilikan mata uang rupiah dan ringgit juga menjadikan mereka lebih aman dari risiko inflasi/deflasi salah satu mata uang. Untuk modal politik/pemerintahan, lemahnya pelaksanaan pemerintahan desa yang modern tertutupi dengan besarnya perhatian pemerintah pusat berikut berbagai kebijakan dan programnya.

Namun demikian, cukup kuatnya empat modal ketahanan sosial di atas tetap harus dibarengi dengan tingkat kewaspadaan terhadap beberapa isu yang sedang berkembang. Untuk modal alam, harus diwaspadai pertumbuhan perkebunan kelapa sawit dan tambang emas di pinggir sungai. Perlu ada kebijakan pengelolaan agar pertumbuhan dua industri tersebut tetap memperhatikan aspek sosial-budaya setempat dan aspek lingkungan, sehingga pembangunannya tidak bersifat antroposentris dan *pro-growth* saja, tetapi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pelibatan unsur masyarakat lokal dalam pembuatan rencana tata ruang wilayah secara umum maupun dalam proses perizinan perkebunan besar secara khusus. Selain itu, peraturan yang mewajibkan penggunaan tenaga kerja lokal sampai batas proporsi tertentu juga perlu dibuat agar menjamin kebermanfaatan operasi perkebunan dan industri tambang tersebut bagi warga Entikong.

Untuk modal sosial, perlu pengurangan tingkat kebergantungan warga Entikong terhadap wilayah Tebedu, dibandingkan warga Tebedu terhadap wilayah Entikong. Perlu ada mekanisme penjaminan bahwa kebergantungan ini tidak menyulitkan warga di kemudian hari, yang dapat dilakukan dengan penguatan perjanjian kerja sama lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga harus secara paralel memperbaiki distribusi barang dari ibukota kabupaten/provinsi ke Kecamatan Entikong.

Untuk modal keuangan, perlu diperhatikan potensi dominannya penggunaan mata uang ringgit terhadap rupiah di Entikong, yang dapat membuat nilai tukar rupiah terhadap ringgit di tingkat lokal akan semakin melemah. Untuk modal pemerintahan, banyaknya program dan bantuan dari pemerintah pusat jangan sampai membuat karakter masyarakat Entikong menjadi manja, ingin mendapatkan sesuatu secara instan tanpa kerja keras. Oleh karena itu, selain bantuan dalam bentuk fisik, bantuan dalam bentuk pelatihan kerja dan kegiatan sejenis yang membantu meningkatkan modal sumber daya manusia juga harus diperbanyak, yang disertai dengan pendampingan agar mereka mandiri sampai batas waktu tertentu.

Selain empat modal yang kuat, ada pula dua modal ketahanan sosial masyarakat Entikong yang terlihat cukup lemah. Pertama, modal fisik, di mana ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan darat, alat transportasi, akses listrik, dan sarana komunikasi dua arah yang masih terbatas, terutama untuk desa-desa yang jauh dari kota kecamatan. Kedua, modal manusia, yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan yang dilihat dari mayoritas penduduk yang hanya lulusan SD dan tidak lulus SD, serta rendahnya tingkat kesehatan akibat ketidakmerataan fasilitas dan tenaga kesehatan di desa-desa pelosok.

Walaupun modal fisik dan modal manusia cenderung lemah, tetapi ada potensi yang tampak di dalam masyarakat Entikong yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan dua modal tersebut. Untuk modal fisik, pembangunan jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong pada tahun 2015-2018 ini diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi penyediaan

infrastruktur lainnya seperti listrik dan sarana komunikasi. Selama ini, pemerintah sulit menyediakan dua sarana tersebut karena tidak ada jalan darat proporsional yang dapat dipakai untuk menjangkau daerah pelosok perbatasan. Untuk modal manusia, penduduk Entikong yang mayoritas berada dalam usia produktif merupakan potensi tenaga kerja yang prospektif dalam pembangunan kawasan perbatasan tersebut.

Identifikasi terhadap enam modal ketahanan sosial masyarakat Entikong di atas menggambarkan besarnya peluang masyarakat Entikong untuk memiliki ketahanan sosial dalam menghadapi MEA. Untuk karakter MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi misalnya, kekayaan alam wilayah Entikong dapat menjadi potensi yang baik untuk membangun basis produksi lada, kelapa sawit, dan produk turunannya. Dengan dibangunnya industri pengolahan, masyarakat tidak perlu menjual lada dan hasil kebun lainnya dalam bentuk mentah ke wilayah Malaysia. Atau dapat pula industri dibangun di wilayah Malaysia, sementara Entikong menjadi pemasok utama bahan bakunya dengan harga beli yang kompetitif.

Untuk karakter MEA sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, besarnya proporsi penduduk usia kerja di Entikong dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di kawasan Entikong. Sementara untuk karakter MEA sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, interaksi ekonomi yang intensif antara Entikong dan Tebedu sebenarnya merupakan salah satu jalur untuk pemerataan ekonomi, dibandingkan bila tidak ada interaksi sama sekali. Hal yang perlu dibenahi adalah bagaimana keuntungan tersebut dapat berjalan dua arah secara seimbang, sehingga tercipta kesalingbergantungan sebagai pengganti kebergantungan yang selama ini terjadi. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menetapkan Entikong menjadi lokasi prioritas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi merupakan langkah maju menuju pengurangan tingkat kebergantungan tersebut.

Untuk karakter MEA sebagai kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global, penetapan Entikong sebagai Pos Lintas Batas

Negara menyiratkan bahwa Entikong disiapkan sebagai pintu gerbang Indonesia terhadap dunia luar. PLBN Entikong ini dapat menjadi jalur keterhubungan ekonomi Indonesia dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Hal ini terkait dengan program pembangunan *Western Borneo Economic Corridor* dalam kerangka kerja sama *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) yang diakui sebagai kerja sama subregional penting bagi pembangunan keterhubungan ASEAN.⁴⁷ Untuk mencapai tahap integrasi dengan ekonomi global, penguatan berbagai aspek modal/bidang harus terus dilakukan, bukan hanya di Entikong dan kawasan perbatasan yang lain, tetapi juga di wilayah-wilayah Indonesia lainnya.

Untuk langkah ke depan, masyarakat Entikong dan pihak-pihak yang berkepentingan harus segera memperkuat modal-modal ketahanan sosial yang masih lemah sembari mempertahankan dan mengembangkan modal-modal ketahanan sosial yang relatif cukup kuat. Hal ini mengingat modal ketahanan sosial adalah sesuatu yang dinamis, termasuk pula tantangan-tantangan perubahan yang dihadapinya. Selain memperhatikan aspek internalnya, pembangunan ketahanan sosial juga harus memperhatikan faktor-faktor dari luar yang dapat turut mempengaruhi dinamika di kawasan perbatasan Entikong.

Kondisi Ketahanan Masyarakat

Entikong: Faktor Eksternal

Walaupun ketahanan sosial seharusnya mengandalkan modal dan sumber daya internal, tetapi dalam kasus di wilayah perbatasan, modal dan sumber daya eksternal juga dapat dimanfaatkan untuk menguatkan ketahanan sosial tersebut. Dalam hal ini, sumber daya dari Malaysia juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan masyarakat Entikong.

Karena isu kedaulatan negara, masyarakat Entikong tidak dapat begitu saja memanfaatkan sumber daya/modal yang ada di wilayah Malaysia. Perlu ada aturan/mekanisme yang

⁴⁷ ASEAN, *Master Plan on ASEAN Connectivity*, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2011), hlm. 33.

dirancang oleh pemerintah kedua negara yang memfasilitasi hal tersebut. Aturan tersebut terwujud dalam perjanjian kerja sama lintas batas.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah sejak lama menginisiasi kerja sama lintas batas ini. Kedua negara menyepakati Pengaturan Dasar mengenai Lintas Batas tertanggal 26 Mei 1967 dan Persetujuan mengenai Lintas Batas yang ditandatangani di Medan pada 12 Mei 1984. Kedua perjanjian ini kemudian diganti dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Lintas Batas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing*) tertanggal 12 Januari 2006 di Bukit Tinggi.

Perjanjian tersebut menetapkan Kecamatan Entikong sebagai salah satu kawasan perbatasan Indonesia yang masuk dalam wilayah jangkauan kerja sama lintas batas, di samping kecamatan-kecamatan lain di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, dan Kepulauan Riau.⁴⁸ Sementara kawasan perbatasan Malaysia meliputi Serawak, Sabah, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, dan Selangor. Di Kecamatan ini juga disepakati untuk dibangun *exit/entry point* Entikong, sementara di sisi Malaysia terdapat *exit/entry point* Tebedu. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara menerapkan kebijakan kemudahan penggunaan pas lintas batas (*border pass*) bagi warga kawasan perbatasan. Pas lintas batas ini dapat digunakan oleh warga Entikong untuk berkunjung ke wilayah Tebedu dengan maksimal radius 5 km, demikian juga sebaliknya. Kegiatan lintas batas yang dibolehkan dengan pas lintas batas adalah untuk tujuan kunjungan keluarga, sosial/budaya, perdagangan lintas batas, tugas pemerintahan, dan tujuan-tujuan lain yang disepakati oleh kedua pihak. Pengguna pas lintas batas dapat berkunjung ke negara tetangga maksimal 14 hari dan berlaku sampai dua tahun sejak tanggal penerbitan. Jika warga Entikong ingin berkunjung ke wilayah Malaysia di luar radius 5 km atau ingin tinggal lebih lama dari 14 hari, mereka harus menggunakan paspor.

⁴⁸ Pada waktu perjanjian dibuat, Kecamatan Sebatik masih masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Seiring dengan pendirian Provinsi Kalimantan Utara pada 2 Oktober 2012, Kecamatan Sebatik kemudian menjadi wilayah dari Provinsi Kalimantan Utara.

Secara lebih spesifik, kedua negara juga mengatur kerja sama perdagangan lintas batas melalui penandatanganan *Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia* di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1970. Persetujuan tersebut mengatur perdagangan lintas batas di darat dan di laut. Dari sisi Indonesia, komoditas perdagangannya adalah produk pertanian dan produk kawasan perbatasan lainnya, kecuali mineral, minyak, dan bijih-bijihan. Dari sisi Malaysia, komoditas perdagangan yang dibolehkan adalah barang-barang kebutuhan/konsumsi sehari-hari, termasuk perkakas, peralatan, dan produk lain yang dibutuhkan industri di kawasan perbatasan Indonesia. Dalam konteks Kecamatan Entikong sebagai perbatasan darat, besarnya nilai barang dagangan tersebut dibatasi maksimal 60 ringgit perorang perbulan.

Terkait dengan kerja sama lintas batas di atas, masyarakat Entikong dapat melakukan kunjungan keluarga dan sosial-budaya ke wilayah Tebedu, dan demikian juga sebaliknya. Hal ini dapat mempererat hubungan keluarga/klan dan memperluas jaringan masyarakat Entikong. Misal pun terjadi perubahan alam seperti bencana banjir/longsor atau perubahan sosial seperti konflik etnis,⁴⁹ masyarakat Kecamatan Entikong dapat dengan lebih mudah mengungsi ke keluarga dan kenalan mereka di Tebedu untuk sementara. Dengan kata lain, kerja sama lintas batas ini dapat meningkatkan modal sosial masyarakat Entikong dengan menggunakan potensi sumber daya eksternal.

Selain itu, ada pula sebagian warga Entikong yang memanfaatkan kerja sama lintas batas dengan bekerja di Malaysia, baik yang menetap maupun yang komuter (pulang pergi). Dengan bekerja, maka mereka pun mendapatkan penghasilan yang besarnya relatif lebih besar dibanding penghasilan yang mereka dapatkan jika bekerja di Indonesia dengan pekerjaan yang sama. Selain itu, banyak pula pedagang di Entikong yang berbelanja produk-produk Malaysia untuk kemudian dijual lagi di pasar Entikong. Apalagi, harga produk di Malaysia

⁴⁹ Konflik berbau etnis pernah terjadi pada awal dekade 2000-an antara masyarakat Melayu-Dayak dengan masyarakat Madura di Kalimantan Barat dan menjangkau hingga Kabupaten Sanggau, induk dari Kecamatan Entikong.

biasanya lebih murah bila dibandingkan harga produk sejenis produksi Indonesia, seperti LPG, air mineral, susu, minyak goreng, dan lain-lain. Sehingga, keuntungan yang didapatkan menjadi lebih besar. Dengan kata lain, kerja sama lintas batas ini juga dapat meningkatkan modal keuangan masyarakat Entikong dengan memanfaatkan sumber daya lapangan pekerjaan dan produk murah Malaysia.

Namun demikian, jalannya kerja sama lintas batas di atas juga mendapat kritikan dari warga Entikong sendiri. Mereka mengeluhkan kuota nilai perdagangan yang kecil, hanya 600 ringgit, atau sekitar 1,5 juta rupiah perorang perbulan. Apalagi, nilai tukar rupiah terhadap Malaysia antara tahun 1970 saat perjanjian ditandatangani dengan tahun sekarang juga sudah berbeda. Padahal, kebutuhan mereka jauh lebih besar, apalagi untuk para pedagang. Di sisi lain, berlakunya MEA pada tahun 2016 juga menimbulkan ketidakjelasan. Dengan pasar bebas yang diberlakukan di antara negara-negara ASEAN, apakah mekanisme kerja sama lintas batas yang bersifat bilateral ini tetap berlaku atau tidak.

Penentuan komoditas yang boleh diperdagangkan lintas batas dan penerapan kuota sebenarnya ditujukan untuk melakukan proteksi terhadap kepentingan dalam negeri masing-masing. Selama ini, banyak warga Entikong yang menjual hasil panennya tanpa diolah terlebih dahulu ke pasar di Tebedu. Mereka beranggapan bahwa menjual langsung hasil panen lebih cepat menghasilkan uang tanpa perlu repot mengolahnya. Akibatnya, banyak dijumpai produk lada bubuk kemasan buatan Malaysia dijual di Entikong, yang disinyalir bahan bakunya dari Indonesia. Padahal, jika hasil panen seperti lada diolah terlebih dahulu kemudian baru dijual ke Malaysia, pendapatan yang akan diterima akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, proteksi kuota tetap diperlukan, namun perlu dipertimbangkan lagi berapa nilainya, disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Di sisi lain, berlakunya MEA akan membuat produk-produk yang disepakati bebas pajak akan semakin membanjiri wilayah Kalimantan Barat. Hal ini dikhawatirkan dapat mematikan industri-industri kecil yang ada di kawasan

tersebut. Apalagi, masih banyak hambatan yang menghadang pembangunan industri di Indonesia, mulai dari proses perizinan yang lama dan birokratis, infrastruktur jalan untuk jalur distribusi yang masih belum memadai, hingga pungutan-pungutan liar dari pejabat dan preman. Kekhawatiran ini diperkuat dengan data Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*) 2015-2016, di mana Indonesia berada di peringkat 37 di bawah Malaysia yang berada di peringkat 18.⁵⁰

Terkait dengan hal di atas, ketika dikonfirmasi kepada salah seorang asisten deputi di Badan Nasional Pengelola Perbatasan selaku wakil pemerintah, mereka mengatakan bahwa seharusnya jangan mengaitkan kerja sama lintas batas dalam bentuk *border trade agreement* dengan MEA. MEA merupakan rezim *World Trade Organization* (WTO), sementara *border trade agreement* wilayah cakupannya adalah kecamatan, tidak lebih dari itu. Hak-hak masyarakat perbatasan yang memiliki kesamaan suku dengan masyarakat negara tetangga juga harus dihargai.⁵¹ Hak-hak tersebut merujuk pada pasal 36 *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* ayat 1 yang menyatakan bahwa penduduk asli/pribumi, terutama mereka yang terpisah oleh batas-batas antarnegara, mempunyai hak untuk mempertahankan dan mengembangkan kontak, hubungan, dan kerja sama, termasuk aktivitas-aktivitas untuk tujuan spiritual, budaya, politik, ekonomi, dan sosial, dengan anggota mereka sendiri dan juga orang lain di luar mereka. Dengan demikian, *border trade agreement* sebagai manifestasi aktivitas sosial ekonomi tersebut tetap diperlukan walaupun sudah ada MEA.

Sampai saat ini, penulis belum menemukan aturan khusus tentang perdagangan lintas batas dalam konteks MEA. Di dalam Cetak Biru MEA 2025, disebutkan tentang perlunya peningkatan perlindungan konsumen akibat meningkatnya perdagangan lintas batas, tetapi konteksnya adalah peningkatan pengetahuan konsumen dan

⁵⁰ World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2015-2016*, (Geneva: World Economic Forum, 2015), hlm.7.

⁵¹ Disampaikan oleh Asisten Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP dalam Diskusi Kelompok Terfokus di Jakarta, 20 April 2016.

peningkatan keamanan produk.⁵² Oleh karena itu, diperlukan suatu jalan tengah. Rezim kerja sama lintas batas tetap diberlakukan dengan menyesuaikan sejumlah pembatasan dan kuota sesuai dengan konteks kekinian, yang tidak sekecil 600 ringgit, tetapi juga tidak dibuka sebebaskan rezim MEA.

Penutup

Masyarakat perbatasan Entikong, yang terletak di daerah pintu gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia, kini sudah menghadapi pemberlakuan MEA 2016 dan harus bersiap menghadapi MEA 2025 yang lebih inklusif (*people-centred*). Untuk itu, diperlukan ketahanan sosial yang kuat dalam menghadapi perubahan rezim politik-ekonomi tersebut. Bila melihat pada hasil identifikasi terhadap modal/aset yang dimiliki berdasarkan data statistik, masyarakat perbatasan Entikong memiliki beberapa modal ketahanan sosial yang cukup baik, yaitu modal alam berupa akses tanah dan air yang cukup melimpah, modal sosial berupa kedekatan hubungan sosial-budaya dengan warga negara tetangga, modal keuangan dengan tingkat pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran, serta modal politik berupa besarnya perhatian pemerintah pusat. Namun demikian, masih ada beberapa modal yang terlihat lemah, yaitu modal fisik berupa terbatasnya infrastruktur dasar di desa-desa pelosok, serta modal manusia berupa rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya.

Untuk semakin menguatkan ketahanan sosialnya, masyarakat Entikong beserta pemerintah perlu terus berupaya menggali potensi-potensi yang sebenarnya sudah ada untuk diberdayakan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sembari terus mewaspadai berbagai faktor yang dapat menurunkan modal-modal ketahanan sosial. Jika sumber daya yang tersedia terbatas, perlu ada penetapan modal prioritas yang kira-kira dapat memberikan efek berganda (*multiplier effects*), yang dalam penjelasan sebelumnya lebih mengarah pada pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, perlu ada reoptimalisasi kerja sama lintas batas yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan

masyarakat saat ini, misalnya dengan menambah kuota nilai komoditas perdagangan lintas batas, atau membuat peraturan khusus terkait perdagangan lintas batas dalam MEA sebagai bentuk pemenuhan hak-hak masyarakat pribumi perbatasan yang dijamin dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Lebih dari itu, perlu ada upaya penyadaran terhadap masyarakat perbatasan Entikong terhadap pentingnya daya saing dalam konteks MEA ini, sehingga mereka dapat melakukan adaptasi dan transformasi atas kesadaran sendiri, tanpa selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Referensi

Buku dan Jurnal

- Adger, Neil W. 2000. "Social and Ecological Resilience: Are They Related?". *Progress in Human Geography* Vol. 24 No. 3: 347-364.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. 2015. *Kabupaten Sanggau dalam Angka 2015*. Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. 2015. *Kecamatan Entikong dalam Angka 2015*. Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Entikong 2015*. Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. 2015. *Statistik Lalu Lintas WNI dan WNA Kabupaten Sanggau 2014*. Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. 2014. *Kabupaten Sanggau dalam Angka 2014*. Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau.
- Dinas Sejarah Angkatan Darat. 2012. *Peranan TNI AD dalam Pengamanan Perbatasan NKRI*. Bandung: Disjarah AD.
- Community & Regional Resilience Institute. 2013. *Definitions of Community Resilience: An Analysis (A CARRI Report)*. CARRI dan Meridian Institute.
- Keck, Markus dan Patrick Sakdapolrak. 2013. "What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward". *Erdkunde* Vol. 67 No. 1: 5-19.
- Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands dan the Swedish Society for Nature Conservation.

⁵² ASEAN, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), hlm. 13-14.

2006. *The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project*. Amsterdam: AIDEnvironment.

Raharjo, Sandy N. I. April 2013. "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif di Kecamatan Entikong)". *Widyariset* Vol.16 No.1: 71-79

World Economic Forum. 2015. *The Global Competitiveness Report 2015-2016*. Geneva: World Economic Forum.

Dokumen

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing. Bukit Tinggi, 12 Januari 2006.

Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia. Jakarta, 24 Agustus 1970. ASEAN. 2015. *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN. 2011. *Master Plan on ASEAN Connectivity*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN. 2008. *ASEAN Economic Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019*. Jakarta: BNPP.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Jakarta, 28 April 2015.

Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007.

Makalah Seminar/Diskusi

Majale, Mike. "Towards Pro-Poor Regulatory Guidelines for Urban Upgrading", dalam *International Workshop on Regulatory Guidelines for Urban Upgrading*. Bourton-On-Dunsmore, 17-18 Mei 2001.

Mulyana, Agung. 2012. "Kebijakan Umum dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan,

dalam *Diskusi Masalah Kebijakan dan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara*. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

McLeod, R.. "The Impact of Regulations and Procedures on the Livelihoods and Asset Base of the Urban Poor: A Financial Perspective", dalam *International Workshop on Regulatory Guidelines for Urban Upgrading*. Bourton-on-Dunsmore, 17-18 Mei 2001.

Artikel Internet

Aditiasari, Dana. "Jalan di Perbatasan Kalimantan-Malaysia 1.770 Km Harus Tersambung di 2018". 16 Januari 2016. Diakses dari <http://m.detik.com/finance/read/2016/01/16/165019/3120081/4/jalan-di-perbatasan-kalimantan-malaysia-1770-km-harus-tersambung-di-2018>, pada 10 April 2016.

Irawan, Yohanes K. "Adopsi Desain Lokal, PLBN Entikong Lebih Megah Dibanding Malaysia". *Kompas*. 24 Maret 2016. Diakses dari <http://properti.kompas.com/read/2016/03/24/060000821/Adopsi.Desain.Lokal.PLBN.Entikong.Lebih.Megah.Dibanding.Malaysia>, pada 31 Maret 2016.

Kementerian Luar Negeri RI. "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". diakses dari [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/MasyarakatEkonomiASEAN\(MEA\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/MasyarakatEkonomiASEAN(MEA).aspx), pada 30 Maret 2016.

Lombok Post. "Menengok Keakraban Tentara Indonesia dan Malaysia di Garis Perbatasan". 5 Oktober 2015. Diakses dari <http://www.lombokpost.net/2015/10/05/seperti-keluarga-selalu-terharu-saat-berpisah/>, pada 13 April 2016.

Pejabat Daerah Serian, Malaysia. "Maklumat Demografi & Kemudahan Awam Pejabat Daerah Kecil Tebedu". Diakses dari http://www.seriando.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=121&menu_id=0&sub_id=182, pada 6 April 2016.

TENTANG PENULIS

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana di Department of Politics, University of Sheffield dengan Program Studi MSc in Politics with Research Method. Pernah bekerja di beberapa lembaga penelitian, serta melakukan beberapa aktivitas *freelance*. Selain menempuh studi pascasarjana, juga menulis kolom untuk beberapa media. Minat Kajiannya terletak pada keterkaitan antara Gerakan Sosial dan Politik Internasional, dengan isu spesifik pada Islam Politik, Masyarakat Sipil, Regionalisme, dan Politik Identitas. Aktif sebagai Ketua Divisi Kajian Lingkaran Studi Cendekia dan Wakil Ketua PCI Muhammadiyah Inggris Raya 2015-2017. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: armumar1@sheffield.ac.uk

Arwin Datumaya Wahyudi Sumari

Penulis saat ini aktif sebagai analis Kebijakan Rencana Kontijensi Ekonomi dalam Kedeputian Politik dan Strategi, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Gelar Doktorat diperoleh dari Institute Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro dan Informasi. Penulis juga pernah bergabung sebagai peneliti di Intelligent System Research Group (ISRG) dan Signal and System Laboratory (SSL) ITB. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: arwin.sumari@dkn.go.id atau arwin.sumari@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Gelar S2 diperoleh dari Asia and International Studies di Griffith University, Brisbane, Australia. Ia menekuni kajian utama tentang perbatasan antarnegara, khususnya perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga melakukan kajian kajian perbatasan antara Thailand dengan negara-negara tetangganya,

serta mengkaji pendekatan konsep *connectivity* maupun *interconnectivity* di wilayah ASEAN dan sekitarnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: irewatiawani@yahoo.co.id.

David Putra Setyawan

Penulis adalah pemerhati masalah diplomasi pertahanan nasional dan aktif sebagai Deputi Informasi dan Komunikasi dalam Lingkaran Studi Strategis. Gelar Magister diperoleh dari Universitas Pertahanan Indonesia, Program Studi Diplomasi Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fa.davidsetyawan@gmail.com

Diandra Mengko Megaputri

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Pendidikan S1 Hubungan Internasional diselesaikan di Universitas Katolik Parahyangan, sementara pendidikan S2 pada bidang ilmu Manajemen Pertahanan diselesaikan di Universitas Pertahanan Indonesia. Pernah aktif sebagai peneliti pada Indonesia Center for Diplomacy, Democracy, and Defense pada tahun 2012-2013. Minat kajiannya adalah isu-isu yang berhubungan dengan pertahanan, keamanan, Security Sector Reform (SSR), dan Industri Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: diandramengko@yahoo.com

Fathimah Fildzah Izzati

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, anggota redaksi *Indoprogress*, dan penulis buku *Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang*. Pendidikan S1 di bidang Ilmu Politik di tempuh di Universitas Indonesia. Penulis menekuni studi-studi yang berkaitan dengan isu ekonomi politik, buruh, perempuan dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fildzah.izzati@gmail.com

Ikrar Nusa Bhakti

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari FISIP-UI dan gelar Ph.D di bidang Sejarah dan Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia. Beberapa kontribusi tulisannya antara lain termuat dalam buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru (Penerbit Mizan, Bandung), The Fall of Soeharto, Human Security in Asia, Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), serta di jurnal-jurnal ilmiah maupun surat kabar lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: ikrar.lipi@gmail.com

Khanisa Krisman

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sementara pendidikan S2 jurusan Hubungan Internasional ditempuh di College of Asia and The Pacific, Australian National University. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan Information and Communications Technology (ICT), isu-isu cyber dan sosial media dalam Hubungan Internasional, serta isu-isu terkait regionalisme di Asia Tenggara dan ASEAN. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: khanisa_krisman@yahoo.com.

Nanto Sriyanto

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Padjajaran. Sementara pendidikan S2 ditempuh di The University of Queensland, Australia, School of Political Science and International Studies. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan keamanan internasional dan kawasan, politik luar negeri Indonesia serta kajian teori hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: nantosriyanto@gmail.com

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Latar belakang pendidikannya adalah Ilmu Hubungan Internasional untuk S1 dan Resolusi Konflik untuk S2. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: sandy.raharjo@gmail.com.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

